



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**LAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN
TAHUN ANGGARAN 2025
UNAUDITED**

**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

**Jalan Malioboro Nomor 54 Yogyakarta
Telepon : (0274) 512688, 560293, 512820, 565622 & Fax : (0274)
580692
E-mail : setwan@dprd-diy.go.id
(www.dprd.diy.go.id)**

**YOGYAKARTA
55213**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat menyajikan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 189 yang menyebutkan bahwa Laporan Keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh Kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Secara ringkas Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI APBD

Laporan Realisasi APBD menggambarkan perbandingan antara APBD Tahun Anggaran 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2025

ditetapkan sebesar	Rp0,00
--------------------	--------

realisasinya mencapai sebesar	<u>Rp0,00</u>
-------------------------------	---------------

Sehingga kurang dari target sebesar	Rp0,00
-------------------------------------	--------

B. Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2025

ditetapkan sebesar	Rp329.345.097.773,00
--------------------	----------------------

realisasinya mencapai sebesar	<u>Rp228.481.153.926,00</u>
-------------------------------	-----------------------------

sehingga kurang dari anggaran sebesar	Rp100.863.943.847,00
---------------------------------------	----------------------

atau sebesar 30,63%.

C. Surplus/(defisit) Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2025 ditetapkan defisit

sebesar (Rp329.345.097.773,00) dengan realisasi sebesar (Rp228.481.153.926,00) atau sebesar 69,37%.

2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan 1 Januari s.d 31 Desember 2025 yang terdiri dari: Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos-pos Luar Biasa, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan-LO terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp0
Pendapatan Transfer - LO	Rp0
Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO	Rp17.250.000

Beban terdiri dari :

Beban Operasi	(Rp116.556.550.624,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	(Rp6.182.781.783,77)

Defisit Non Operasional:

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan	(Rp634.365.347,40)
Aset Non Lancar – LO	

Surplus/Defisit - Laporan Operasional (Rp123.356.447.755,17)

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2025.

Jumlah Aset per 31 Desember 2025	Rp188.997.609.399,76
Aset Lancar sebesar	Rp283.959.687,00
Aset Tetap sebesar	Rp187.796.402.967,76
Aset Lainnya sebesar	Rp917.246.745,00
Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2025	Rp80.648.983,00
Kewajiban Jangka Pendek sebesar	Rp80.648.983,00
Kewajiban Jangka Panjang sebesar	Rp0,00
Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025	Rp188.916.960.416,76
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp188.997.609.399,76

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Ekuitas Awal	Rp83.940.799.245,93
Surplus/ Defisit Laporan Operasional	(Rp123.356.447.755,17)
RK PPKD	Rp228.481.153.926,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	(Rp148.545.000,00)
Ekuitas Akhir	Rp188.916.960.416,76

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai serta peristiwa penting setelah tanggal pelaporan, dan penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan menggunakan basis kas yaitu pada saat diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah. Sementara dalam penyajian Neraca dan Laporan Operasional pengakuan Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LO, Beban dan Transfer menggunakan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*).

Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), serta tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Desember 2025
Sekretaris DPRD DIY

YUDI ISMONO, S.Sos., M.Acc.
NIP. 197107171996031004

DAFTAR ISI

Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Neraca

Laporan Operasional (LO)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK):

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab III. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Bab IV. Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan SKPD

Bab V. Penutup

Lampiran LRA:

1. Rincian LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
2. Rekapitulasi LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
3. Penjabaran LRA

Lampiran Neraca:

1. Berita Acara Penutupan Kas
2. Register Penutupan Kas
3. Berita Acara Pemeriksaan Kas
4. Register Pemeriksaan Kas
5. Rekapitulasi Belanja Barang Pakai Habis
6. Berita Acara Stock Opname Persediaan
7. Rekapitulasi Belanja Modal (Aset Tetap)
8. Kertas Kerja Aset Tetap dan Aset Lainnya
9. Kertas Kerja Mutasi Persediaan
10. Rekap Penyusutan Aset Tetap dan Rekap Penyusutan Aset Lain-lain
11. Rekap Buku Inventaris Klasifikasi Intracountable per 31 Desember 2025

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DPRD

ကမာကွဟာဂိဇယဟျကမာ\ကပ\င\ကမာ

Alamat Jalan Malioboro 54 Yogyakarta Kode Pos 55213 Telepon (0274) 512688, 51280, 560293

Faksimile (0274) 580692 Pos-el setwan_dprd@jogjaprovo.go.id Laman dprd-diy.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Yogyakarta, 31 Desember 2025
Sekretaris DPRD DIY

YUDI ISMONO, S.Sos., M.Acc.

NIP. 197107171996031004

PEMERINTAHAN DAERAH DI YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	329.345.097.773,0	228.481.153.926,00	69,37	117.864.216.057,00
5.1	BELANJA OPERASI	130.195.587.773,0	116.716.191.242,00	89,65	117.164.264.585,00
5.1.01	Belanja Pegawai	55.461.408.603,00	53.948.429.434,00	97,27	51.207.971.633,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.734.179.170,00	62.767.761.808,00	83,99	65.956.292.952,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	130.195.587.773,00	116.716.191.242,00	89,64	117.164.264.585,00
5.2	BELANJA MODAL	199.149.510.000,0	111.764.962.684,00	56,12	699.951.472,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.128.890.000,00	2.066.149.327,00	97,05	305.724.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.000.000.000,00	109.687.339.757,00	55,68	375.703.672,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.620.000,00	11.473.600,00	55,64	18.523.800,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	199.149.510.000,00	111.764.962.684,00	56,12	699.951.472,00
	JUMLAH BELANJA	329.345.097.773,00	228.481.153.926,00	69,37	117.864.216.057,00
	SURPLUS/DEFISIT	(329.345.097.773,00)	(228.481.153.926,00)	69,37	(117.864.216.057,00)

Yogyakarta, 31 Desember 2025
Sekretaris DPRD DIY

YUDI ISMONO, S.Sos., M.Acc.
NIP. 197107171996031004

PEMERINTAHAN DAERAH DI YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	188.997.609.399,76	84.023.423.058,93
1.1	ASET LANCAR	283.959.687,00	126.293.899,00
1.1.12	Persediaan	283.959.687,00	126.293.899,00
	JUMLAH ASET LANCAR	283.959.687,00	126.293.899,00
1.3	ASET TETAP	187.796.402.967,76	82.772.819.914,93
1.3.02	Peralatan dan Mesin	22.950.952.225,27	25.531.606.036,09
1.3.03	Gedung dan Bangunan	576.741.303.378,00	576.741.303.378,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	736.629.559,00	736.629.559,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	863.264.952,01	855.691.352,01
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	111.895.403.679,00	2.208.063.922,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(525.391.150.825,52)	(523.300.474.332,17)
	JUMLAH ASET TETAP	187.796.402.967,76	82.772.819.914,93
1.5	ASET LAINNYA	917.246.745,00	1.124.309.245,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	917.246.745,00	917.246.745,00
1.5.04	Aset Lain-lain	15.505.000,00	1.286.566.933,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(15.505.000,00)	(1.079.504.433,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	917.246.745,00	1.124.309.245,00
	JUMLAH ASET	188.997.609.399,76	84.023.423.058,93
2	KEWAJIBAN	80.648.983,00	82.623.813,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	80.648.983,00	82.623.813,00
2.1.06	Utang Belanja	80.648.983,00	82.623.813,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	80.648.983,00	82.623.813,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	80.648.983,00	82.623.813,00
3	EKUITAS	188.916.960.416,76	83.940.799.245,93
3.1	EKUITAS	188.916.960.416,76	83.940.799.245,93
3.1.01	Ekuitas	(39.564.193.509,24)	(33.923.416.811,07)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	228.481.153.926,00	117.864.216.057,00
	JUMLAH EKUITAS	188.916.960.416,76	83.940.799.245,93
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	188.997.609.399,76	84.023.423.058,93

Yogyakarta, 31 Desember 2025
Sekretaris DPRD DIY

YUDI ISMONO, S.Sos., M.Acc.
NIP. 197107171996031004

PEMERINTAHAN DAERAH DI YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	17.250.000,00	0,00	17.250.000,00	100,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	17.250.000,00	0,00	17.250.000,00	100,00
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	17.250.000,00	0,00	17.250.000,00	100,00
8	BEBAN	122.739.332.407,77	123.521.619.509,12	(782.287.101,35)	(0,63)
8.1	BEBAN OPERASI	116.556.550.624,00	117.171.561.198,00	(615.010.574,00)	(0,52)
8.1.01	Beban Pegawai	53.948.429.434,00	51.207.971.633,00	2.740.457.801,00	5,35
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	62.608.121.190,00	65.963.589.565,00	(3.355.468.375,00)	(5,09)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	116.556.550.624,00	117.171.561.198,00	(615.010.574,00)	(0,52)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.182.781.783,77	6.350.058.311,12	(167.276.527,35)	(2,63)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	6.182.781.783,77	6.350.058.311,12	(167.276.527,35)	(2,63)
	JUMLAH BEBAN	122.739.332.407,77	123.521.619.509,12	(782.287.101,35)	(0,63)
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL – LO	634.365.347,40	41.340.030,00	593.025.317,40	1.434,51
8.4.01	Defisit Penjualan / Pertukaran / Pelepasan Aset Non Lancar - LO	634.365.347,40	41.340.030,00	593.025.317,40	1.434,51
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(123.356.447.755,17)	(123.562.959.539,12)	206.511.783,95	(0,17)

Yogyakarta, 31 Desember 2025
Sekretaris DPRD DIY

YUDI ISMONO, S.Sos., M.Acc.
NIP. 197107171996031004

PEMERINTAHAN DAERAH DI YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DPRD

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024
EKUITAS AWAL	83.940.799.245,93	88.528.633.522,31
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(123.356.447.755,17)	(123.562.959.539,12)
RK PPKD	228.481.153.926,00	117.864.216.057,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(148.545.000,00)	1.110.909.205,74
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP		
LAIN-LAIN	(148.545.000,00)	1.110.909.205,74
EKUITAS AKHIR	188.916.960.416,76	83.940.799.245,93

Yogyakarta, 31 Desember 2025
Sekretaris DPRD DIY

YUDI ISMONO, S.Sos., M.Acc.
NIP. 197107171996031004

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagai entitas akuntansi Laporan Keuangan Sekretariat DPRD DIY disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan serta peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut Laporan Keuangan Sekretariat DPRD DIY menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, beban, dan ekuitas.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Sekretariat DPRD DIY diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 5);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 46);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 27);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43);
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 37); .

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 1.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

1.3. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

3.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

3.1.1 Belanja

3.1.2 Aset

3.1.3 Kewajiban

3.1.4 Ekuitas

3.1.5. Pendapatan - LO

3.1.6 Beban

3.1.7 Laporan Perubahan Ekuitas

BAB IV Penjelasan atas Informasi-informasi Nonkeuangan SKPD

BAB V PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Belanja Sekretariat DPRD DIY dianggarkan sebesar Rp329.345.097.773,00. Jumlah anggaran tersebut digunakan untuk mendanai berbagai program kegiatan di Sekretariat DPRD DIY. Secara lebih rinci, Belanja pada Sekretariat DPRD DIY mencakup 2 Program, 17 Kegiatan, dan 55 Subkegiatan. Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan DPA Nomor DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tertanggal 02 Januari 2025 memperoleh anggaran sebesar Rp 326.833.476.699,00 Setelah perubahan anggaran sesuai dengan Nomor DPPA DPPA/A.4/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tertanggal 11 November 2025 anggaran Sekretariat DPRD DIY menjadi Rp329.345.097.773,00. Anggaran Perubahan Sekretariat DPRD DIY mengalami kenaikan sebesar Rp2.511.621.074,00 dibandingkan dengan Anggaran Murni Tahun Anggaran 2025. Belanja Sekretariat DPRD DIY telah terealisasi sebesar Rp228.481.153.926,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Rekening	Anggaran Rp	Realisasi		Lebih/Kurang	
			Rp	%	Rp	%
5	BELANJA DAERAH	329.345.097.773	228.481.153.926	69,37	100.863.943.847	30,63
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	266.552.610.971	176.473.149.183	66,21	90.079.461.788	33,79
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.254.200	53.004.800	94,22	3.249.400	5,78
4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.873.000	17.278.680	96,67	594.320	3,33
4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.194.000	15.429.920	89,74	1.764.080	10,26
4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.187.200	20.296.200	95,79	891.000	4,21
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.263.684.043	9.464.852.888	92,22	798.831.155	7,78
4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.176.008.743	9.387.499.364	92,25	788.509.379	7,75
4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.518.000	16.470.000	99,71	48.000	0,29
4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.607.500	10.064.300	94,88	543.200	5,12
4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	60.549.800	50.819.224	83,93	9.730.576	16,07
4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.690.000	13.690.000	100,00	-	0,00
4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.690.000	13.690.000	100,00	-	0,00
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	439.957.900	340.785.500	77,46	99.172.400	22,54
4.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.305.000	10.008.600	97,12	296.400	2,88
4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	429.652.900	330.776.900	76,99	98.876.000	23,01
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.042.811.600	790.484.144	75,80	252.327.456	24,20

Kode Rekening	Uraian Rekening	Anggaran Rp	Realisasi		Lebih/Kurang	
			Rp	%	Rp	%
4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.668.000	39.084.626	96,11	1.583.374	3,89
4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.405.600	122.144.240	92,25	10.261.360	7,75
4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	221.821.000	201.778.880	90,96	20.042.120	9,04
4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	109.940.000	99.962.675	90,92	9.977.325	9,08
4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	537.977.000	327.513.723	60,88	210.463.277	39,12
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.128.890.000	111.753.489.084	56,12	87.375.400.916	43,88
4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.128.890.000	2.066.149.327	97,05	62.740.673	2,95
4.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	197.000.000.000	109.687.339.757	55,68	87.312.660.243	44,32
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.567.953.264	4.380.364.625	95,89	187.588.639	4,11
4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.174.163.500	1.014.585.543	86,41	159.577.957	13,59
4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.393.789.764	3.365.779.082	99,17	28.010.682	0,83
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.485.738.900	1.155.128.623	77,75	330.610.277	22,25
4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.591.000	32.417.283	66,71	16.173.717	33,29
4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	850.078.900	576.943.393	67,87	273.135.507	32,13
4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	307.380.000	282.880.000	92,03	24.500.000	7,97
4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	279.689.000	262.887.947	93,99	16.801.053	6,01
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	46.062.330.860	45.258.674.069	98,26	803.656.791	1,74
4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	45.285.399.860	44.560.930.070	98,40	724.469.790	1,60
4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	477.978.000	470.424.000	98,42	7.554.000	1,58
4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	298.953.000	227.319.999	76,04	71.633.001	23,96
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	3.491.300.204	3.262.675.450	93,45	228.624.754	6,55
4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	2.775.867.204	2.754.167.450	99,22	21.699.754	0,78
4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	715.433.000	508.508.000	71,08	206.925.000	28,92
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.792.486.802	52.008.004.743	82,83	10.784.482.059	17,17
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	16.763.581.106	14.530.818.365	86,68	2.232.762.741	13,32
4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.053.794.000	939.299.966	89,14	114.494.034	10,86
4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	6.135.131.000	4.576.255.629	74,59	1.558.875.371	25,41
4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.217.967.856	1.114.197.260	91,48	103.770.596	8,52
4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	1.492.973.500	1.312.492.550	87,91	180.480.950	12,09
4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	6.863.714.750	6.588.572.960	95,99	275.141.790	4,01
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	851.293.000	688.105.136	80,83	163.187.864	19,17
4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	379.294.000	299.390.400	78,93	79.903.600	21,07
4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	83.351.000	56.266.650	67,51	27.084.350	32,49

Kode Rekening	Uraian Rekening	Anggaran Rp	Realisasi		Lebih/Kurang	
			Rp	%	Rp	%
4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	141.647.000	128.072.086	90,42	13.574.914	9,58
4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	100.814.000	89.989.000	89,26	10.825.000	10,74
4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	37.460.000	15.926.000	42,51	21.534.000	57,49
4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	108.727.000	98.461.000	90,56	10.266.000	9,44
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.346.211.000	3.972.260.344	74,30	1.373.950.656	25,70
4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.333.314.000	1.084.677.883	81,35	248.636.117	18,65
4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.484.003.000	1.073.640.385	72,35	410.362.615	27,65
4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	875.799.000	665.409.280	75,98	210.389.720	24,02
4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.653.095.000	1.148.532.796	69,48	504.562.204	30,52
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	13.606.289.196	11.900.594.171	87,46	1.705.695.025	12,54
4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	4.677.077.200	3.733.496.812	79,83	943.580.388	20,17
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.496.867.000	2.230.078.995	89,32	266.788.005	10,68
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	728.647.000	678.997.000	93,19	49.650.000	6,81
4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5.473.644.796	5.031.911.780	91,93	441.733.016	8,07
4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	230.053.200	226.109.584	98,29	3.943.616	1,71
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	7.160.794.400	6.828.283.280	95,36	332.511.120	4,64
4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	239.381.400	165.284.280	69,05	74.097.120	30,95
4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	6.921.413.000	6.662.999.000	96,27	258.414.000	3,73
4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	59.402.400	44.305.784	74,59	15.096.616	25,41
4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	59.402.400	44.305.784	74,59	15.096.616	25,41
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	19.004.915.700	14.043.637.663	73,89	4.961.278.037	26,11
4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.523.534.500	5.089.522.661	67,65	2.434.011.839	32,35
4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	15.265.400	14.815.400	97,05	450.000	2,95
4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	523.882.300	398.328.931	76,03	125.553.369	23,97
4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	10.942.233.500	8.540.970.671	78,06	2.401.262.829	21,94

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Secara umum pelaksanaan belanja dan kinerja Sekretariat DPRD DIY dapat dicapai dengan baik serta tidak ada kendala material yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD DIY. Akan tetapi terdapat beberapa sub kegiatan dengan capaian berada di bawah 95%, berikut penjelasannya:

1. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester

Pada Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp37.460.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.926.000,00 atau 42,51%. Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester:

- a. Adanya SE Mendagri tentang percepatan pembahasan perubahan APBD TA 2025. Percepatan pembahasan perubahan APBD TA 2025 berakibat efisiensi makan minuman rapat.
- b. Sisa anggaran berasal dari makan minum rapat Komisi A yang tidak terealisasi karena tidak ada pembahasan prognosis.

2. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pada Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp197.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp109.687.339.757,00 atau 55,68%. Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya:

- a. Sisa *atcost* belanja pendukung.
- b. Untuk penarikan termin II tidak dapat dilaksanakan karena belum mencapai target fisik 55% sesuai kontrak. Dalam sisdur belum diatur terkait batas waktu setiap tahun anggaran untuk kontrak tahun jamak.
- c. Musim hujan menghambat pemasangan atap sehingga pekerjaan dibawahnya tidak bisa dilakukan percepatan.

3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp537.977.000,00 dengan realisasi sebesar Rp327.513.723,00 atau 60,88%. Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD:

- a. Sisa *atcost* biaya perjalanan dinas.

- b. Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah sesuai Pergub Perjalanan Dinas (KA Ekonomi untuk golongan II).
4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp48.591.000,00 dengan realisasi sebesar Rp32.417.283,00 atau 66,71% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan:
 - a. Selisih harga Pertamina dengan perencanaan anggaran.
 - b. Penggantian suku cadang sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Servis kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan.
5. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Pada Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp83.351.000,00 dengan realisasi sebesar Rp56.266.650,00 atau 67,51%. Faktor penghambat pada Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dikarenakan Percepatan pembahasan Perubahan APBD TA 2025 berakibat efisiensi makan minuman rapat-rapat Badan Anggaran dan Rapat Komisi-Komisi.
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp7.523.534.500,00 dengan realisasi sebesar Rp5.089.522.661,00 atau 67,65% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD:
 - a. Sisa anggaran belanja barang berasal dari selisih harga mbiz market.
 - b. Sisa *atcost* biaya perjalanan dinas.
7. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar

Rp850.078.900,00 dengan realisasi sebesar Rp576.943.393,00 atau 67,87% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan:

- a. Selisih harga Pertamina dengan perencanaan anggaran.
- b. Penggantian suku cadang sesuai dengan kebutuhan.
- c. Servis kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan.

8. Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pada Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp239.381.400,00 dengan realisasi sebesar Rp165.284.280,00 atau 69,05% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD:

- a. Efisiensi bantuan transport Narasumber Pusat.
- b. Belanja Honorarium Narasumber untuk Bimtek SIPD tidak direalisasikan karena Narasumber dari Bapperida dan BPKA

9. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

Pada Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.653.095.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.148.532.796,00 atau 69,48% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian:

- a. Sisa perjadi karena tidak semua anggota DPRD menggunakan haknya dan sisa *atcost*.
- b. Kunjungan/Peninjauan Komisi dalam rangka pengawasan tidak optimal karena bersamaan dengan kegiatan lain.
- c. Sisa anggaran berasal dari belanja makan minum rapat yang pelaksanaannya menyesuaikan kebutuhan.

10. Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Pada Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp715.433.000,00 dengan realisasi sebesar Rp508.508.000,00 atau 71,08% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD:

- a. Rapat pimpinan, Rapat Konsultasi, Rapat Gabungan, Rapat kerja pimpinan yang menyesuaikan agenda DPRD.
- b. Belanja hidangan tamu menyesuaikan kebutuhan.

11. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

Pada Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.484.003.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.073.640.385,00 atau 72,35% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur:

- a. Sisa perjadi karena tidak semua anggota DPRD menggunakan haknya dan sisa *atcost*.
- b. Kunjungan/Peninjauan Komisi dalam rangka pengawasan tidak optimal karena dengan bebarengan kegiatan lain.
- c. Sisa anggaran berasal dari belanja makan minum rapat yang menyesuaikan.

12. Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD

Pada Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp59.402.400,00 dengan realisasi sebesar Rp44.305.784,00 atau 74,59% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD:

- a. Kegiatan menyesuaikan agenda DPRD.
- b. *Atcost* Perjadi karena terdapat anggota BK tidak mengikuti Kunjungan Kerja.
- c. Terdapat Efisiensi belanja makan minum rapat pada anggaran.

13. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda

Pada Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp6.135.131.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.576.255.629,00 atau 74,59% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda:

- a. Terdapat anggota dewan yang tidak mengikuti perjalanan dinas konsultasi dan kunjungan kerja pansus.
- b. Adanya perpindahan tujuan kunker dari Jabar ke Jatim yang menyebabkan selisih pada harga satuan uang harian, hotel dan tiket.

14. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pada Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp875.799.000,00 dengan realisasi sebesar Rp665.409.280,00 atau

75,98% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat:

- a. Sisa perjadi karena tidak semua anggota DPRD menggunakan haknya dan sisa *atcost*.
- b. Kunjungan/Peninjauan Komisi dalam rangka pengawasan tidak optimal karena bersamaan dengan kegiatan lain.
- c. Sisa anggaran berasal dari belanja makan minum rapat yang menyesuaikan kebutuhan.

15. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp523.882.300,00 dengan realisasi sebesar Rp398.328.931,00 atau 76,03% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah:

- a. Honorarium narasumber ke pemerintah pusat tidak direalisasikan karena tujuan konsultasi semula ke Kemendagri akhirnya dipindah ke DPRD DKI sehingga honor Narasumber tidak diperlukan.
- b. Perubahan kegiatan DPRD yang menyesuaikan prioritas berakibat efisiensi makan minuman rapat.

16. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp298.953.000,00 dengan realisasi sebesar Rp227.319.999,00 atau 76,04% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD:

- a. Sisa anggaran belanja pelayanan MCU sesuai tagihan.
- b. Beberapa anggota dewan mengkonfirmasi tidak berkenan melaksanakan MCU di tahun 2025 setelah Perubahan APBD TA 2025.

17. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp429.652.900,00 dengan realisasi sebesar Rp330.776.900,00 atau 76,99% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi:

- a. Uji kompetensi perancang perundang-undangan dilaksanakan secara daring sehingga anggaran perjadin tidak digunakan.
- b. Efisiensi dari Sisa *atcost* perjalanan dinas.

18. Sub Kegiatan Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD

Pada Sub Kegiatan Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp10.942.233.500,00 dengan realisasi sebesar Rp8.540.970.671,00 atau 78,06% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD:

- a. Menyesuaikan dengan jadwal pimpinan DPRD.
- b. Belanja makan minum tamu menyesuaikan kunjungan tamu.

19. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS

Pada Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp379.294.000,00 dengan realisasi sebesar Rp299.390.400,00 atau 78,93% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS:

- a. Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas.
- b. Narasumber dianggarkan untuk persediaan jika dilakukan konsultasi ke kementerian. Faktanya anggaran tersebut direalisasikan di DPRD DKI Jakarta sehingga tidak diberikan.

20. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD

Pada Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.677.077.200,00 dengan realisasi sebesar Rp3.733.496.812,00 atau 79,83% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD:

- a. Terdapat perubahan kategori dari belanja kursus singkat/pelatihan ke belanja bimbingan teknis. Semula direncanakan bentuk kursus singkat/pelatihan namun direalisasikan dalam bentuk bimbingan teknis menyesuaikan dengan penyelenggara.
- b. Sisa *atcost* perjalanan dinas bimtek dewan dan pendamping.

21. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

Pada Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.333.314.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.084.677.883,00 atau

81,35% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum:

- a. Sisa perjadi karena tidak semua anggota DPRD menggunakan haknya dan *sisa atcost*.
- b. Kunjungan/Peninjauan Komisi dalam rangka pengawasan tidak optimal karena bersamaan dengan kegiatan lain.
- c. Sisa anggaran berasal dari belanja makan minum rapat yang menyesuaikan kebutuhan.

22. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp60.549.800,00 dengan realisasi sebesar Rp50.819.224,00 atau 83,93% Faktor penghambat pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dikarenakan sisa anggaran berasal dari selisih harga mbiz market.

23. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.174.163.500,00 dengan realisasi sebesar Rp1.014.585.543,00 atau 86,41%. Faktor penghambat pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah dikarenakan realisasi menyesuaikan kebutuhan/tagihan.

24. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik

Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.492.973.500,00 dengan realisasi sebesar Rp1.312.492.550,00 atau 87,91%. Faktor penghambat pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik adalah adanya sisa anggaran berasal dari jasa konsultasi yaitu selisih harga kontrak dengan pagu anggaran.

25. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Pada Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar

Rp1.053.794.000,00 dengan realisasi sebesar Rp939.299.966,00 atau 89,14% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah:

- a. Sisa perjalanan dinas karena beberapa dewan tidak mengikuti perjalanan dinas.
- b. Efisiensi hidangan makan minum rapat karena penggabungan beberapa pembahasan dalam satu agenda.

26. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan APBD

Pada Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp100.814.000,00 dengan realisasi sebesar Rp89.989.000,00 atau 89,26% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan APBD:

- a. Percepatan pembahasan Perubahan APBD TA 2025 berakibat efisiensi makan minuman rapat-rapat Badan Anggaran dan Rapat Komisi-Komisi.
- b. Efisiensi makan minum rapat sampai akhir tahun anggaran.

27. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.496.867,00 dengan realisasi sebesar Rp2.230.078.995,00 atau 89,32%. Faktor penghambat pada Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, antara lain: Pemberian honor pakar dan tim ahli sesuai tingkat pendidikan (realisasi lebih rendah dari anggaran) dan sesuai kehadiran sehingga menyisakan anggaran.

28. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp17.194.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.429.920,00 atau 89,74% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD:

- a. Sisa anggaran berasal dari selisih harga mbiz market.
- b. Agenda rapat yang menyesuaikan kebutuhan.

29. Sub Kegiatan Pembahasan APBD

Pada Sub Kegiatan Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp141.647.000,00 dengan realisasi sebesar Rp128.072.086,00 atau 90,42% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Pembahasan APBD:

- a. Sisa anggaran berasal dari belanja makan minum rapat yang menyesuaikan kebutuhan.
- b. Sisa anggaran berasal dari efisiensi honorarium narasumber.

30. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Pada Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp108.727.000,00 dengan realisasi sebesar Rp98.461.000,00 atau 90,56% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD:

- a. Sisa anggaran berasal dari selisih harga mbiz.
- b. Agenda rapat yang menyesuaikan kebutuhan.

31. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp109.940.000,00 dengan realisasi sebesar Rp99.962.675,00 atau 90,92% Faktor penghambat pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan antara lain disebabkan sisa anggaran berasal dari selisih harga mbiz market.

32. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp221.821.000,00 dengan realisasi sebesar Rp201.778.880,00 atau 90,96%. Faktor penghambat pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga berasal dari Efisiensi sisa lelang pengadaan.

33. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.217.967.856,00 dengan realisasi sebesar Rp1.114.197.260,00 atau 91,48% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan:

- a. Untuk kegiatan fumigasi yg terdapat pada kegiatan fasilitasi kajian perundang-undangan tidak terealisasi dikarenakan kegiatan serupa yaitu fumigasi terdapat juga di Bagian Umum dimana kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada bulan April 2025 (SPK 17 April 2025) dan ruangan Perpustakaan juga ikut menjadi bagian yg di lakukan fumigasi, sehingga ada kekhawatiran double kegiatan jika fumigasi yg ada di kajian perundang-undangan ikut dilaksanakan,,
- b. Sisa anggaran berasal dari selisih harga mbiz market.

34. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp5.4736.644.796,00 dengan realisasi sebesar Rp5.031.911.780,00 atau 91.93% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat:

- a. Jadwal pelaksanaan kegiatan menunggu/menyesuaikan jadwal Anggota DPRD.
- b. Efisiensi perjalanan dinas Prestour dengan adanya pergeseran tujuan semula ke NTT selama 4 hari menjadi ke Bali selama 3 hari.

35. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp307.380.000,00 dengan realisasi sebesar Rp282.880.000,00 atau 92.03% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya:

- a. Servis peralatan menyesuaikan jadwal rutin yang telah terjadwal.
- b. Penggantian suku cadang menyesuaikan kerusakan/masa pakai.
- c. Efisiensi BBM genset dan pemeliharaan komputer.

36. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp132.405.600,00 dengan realisasi sebesar Rp122.144.240,00 atau 92.25% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor:

- a. Sisa anggaran berasal dari selisih harga mbiz market.
- b. Rasionalisasi anggaran pembelian Materai.
- c. Efisiensi penggunaan leges (materai untuk cek) karena transaksi sudah menggunakan CMS/Non Tunai. .

37. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp10.176.008.743,00 dengan realisasi sebesar Rp9.387.499.364,00 atau 92.25% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN:

- a. Adanya kekosongan beberapa fungsional dan pensiun PNS.
- b. Kebijakan Pemda terhadap pembayaran TPP ke-13 sebesar 80 %.
- c. Terdapat *accres* dan *speling* Gaji sehingga menyisakan anggaran kas.

38. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp728.647.000,00 dengan realisasi sebesar Rp678.997.000,00 atau 93.19% Berikut faktor penghambat pada Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi:

- a. Pergantian 1 personil TA dari fraksi Gerindra.
- b. Pelaksanaan FGD menyesuaikan.

39. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp279.689.000,00 dengan realisasi sebesar Rp262.887.947,00 atau 93.99%. Faktor penghambat pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya karena efisiensi sisa pengadaan.

40. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp10.607.500,00 dengan realisasi sebesar Rp10.064.300,00 atau 94.88%. Faktor penghambat pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sisa anggaran berasal dari selisih harga mbiz market

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan

	2025	2024
3.1.1 <u>Belanja</u>	<u>Rp228.481.153.926,00</u>	<u>Rp117.864.216.057,00</u>
Belanja Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp329.345.097.773,00 dengan realisasi sebesar Rp228.481.153.926,00 atau 69,37%. Realisasi belanja Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp110.616.937.869,00 atau 93,85%. dibandingkan realisasi belanja tahun 2024. Rincian realisasi belanja terdiri dari:		

	2025	2024
3.1.1.1 <u>Belanja Operasi</u>	<u>Rp116.716.191.242,00</u>	<u>Rp117.164.264.585,00</u>
Belanja Operasi Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp130.195.587.773,00 dengan realisasi sebesar Rp116.716.191.242,00 atau 89,65%. Realisasi belanja operasi Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp448.073.343,00 atau 0,38% dibandingkan realisasi belanja operasi tahun 2024. Rincian realisasi belanja operasi sebagai berikut:		

	2025	2024
3.1.1.1.1 <u>Belanja Pegawai</u>	<u>Rp53.948.429.434,00</u>	<u>Rp51.207.971.633,00</u>
Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp55.461.408.603,00 dengan realisasi sebesar Rp53.948.429.434,00 atau 97,27%. Realisasi belanja pegawai Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.740.457.801.00 atau 5,35% dibandingkan realisasi belanja pegawai tahun 2024. Belanja pegawai pada Sekretariat DPRD DIY dibedakan menjadi 2 jenis belanja yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi sebesar Rp 4.490.679.764,00 dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN dengan realisasi sebesar Rp4.896.819.600,00. Rincian realisasi belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagai berikut:		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		Rp	Rp	
5.1.01	Belanja Pegawai	55.461.408.603,00	53.948.429.434,00	97,27
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.277.752.968,00	4.490.679.764,00	85,09
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.721.025.037,00	3.414.183.053,00	91,75
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.667.639.301,00	2.534.527.569,00	95,01
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.053.385.736,00	879.655.484,00	83,51
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	353.864.066,00	273.478.979,00	77,28
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	244.362.557,00	219.690.715,00	89,90
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	109.501.509,00	53.788.264,00	49,12
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	163.940.000,00	163.940.000,00	100,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	163.940.000,00	163.940.000,00	100,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	324.334.850,00	57.721.000,00	17,80
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	74.634.850,00	55.135.000,00	73,87
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	249.700.000,00	2.586.000,00	1,04
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	87.870.000,00	86.080.000,00	97,96
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	87.870.000,00	86.080.000,00	97,96
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	208.931.700,00	162.075.960,00	77,57
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	139.480.920,00	123.693.360,00	88,68
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	69.450.780,00	38.382.600,00	55,27
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	41.629.795,00	34.110.843,00	81,94
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	41.629.795,00	34.110.843,00	81,94
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	69.330,00	42.122,00	60,76
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	46.263,00	33.414,00	72,23
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	23.067,00	8.708,00	37,75
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	344.825.695,00	271.703.508,00	78,79
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	289.533.306,00	222.170.196,00	76,73
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	55.292.389,00	49.533.312,00	89,58
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.941.062,00	7.037.301,00	88,62
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.668.501,00	5.214.285,00	91,99
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.272.561,00	1.823.016,00	80,22
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	23.321.433,00	20.306.998,00	87,07
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	17.005.560,00	15.643.006,00	91,99
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	6.315.873,00	4.663.992,00	73,85

Sedangkan rincian realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		Rp	Rp	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.898.255.775,00	4.896.819.600,00	99,97
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.331.323.447,00	2.331.305.100,00	100,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.082.359.201,00	2.082.346.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		Rp	Rp	
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	248.964.246,00	248.959.100,00	100,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	412.655.441,00	411.249.800,00	99,66
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	412.655.441,00	411.249.800,00	99,66
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.154.276.887,00	2.154.264.700,00	100,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.905.312.641,00	1.905.305.600,00	100,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	248.964.246,00	248.959.100,00	100,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	44.925.399.860,00	44.200.930.070,00	98,39
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.749.300.000,00	1.733.550.000,00	99,10
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.749.300.000,00	1.733.550.000,00	99,10
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	244.902.000,00	168.300.000,00	68,72
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	244.902.000,00	168.300.000,00	68,72
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	223.053.600,00	133.470.060,00	59,84
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	223.053.600,00	133.470.060,00	59,84
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	149.940.000,00	148.815.000,00	99,25
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	149.940.000,00	148.815.000,00	99,25
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.536.485.000,00	2.513.647.500,00	99,10
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.536.485.000,00	2.513.647.500,00	99,10
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	239.076.000,00	237.118.500,00	99,18
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	239.076.000,00	237.118.500,00	99,18
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	89.610.000,00	50.416.500,00	56,26
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	89.610.000,00	50.416.500,00	56,26
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	9.900.000.000,00	9.825.000.000,00	99,24
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	9.900.000.000,00	9.825.000.000,00	99,24
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.475.000.000,00	2.430.000.000,00	98,18
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.475.000.000,00	2.430.000.000,00	98,18
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.608.601.574,00	1.542.016.370,00	95,86
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.608.601.574,00	1.542.016.370,00	95,86
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	13.994.131.686,00	13.821.846.140,00	98,77
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	218.137.446,00	148.959.900,00	68,29
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.598.560,00	3.571.560,00	99,25

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		Rp	Rp	
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.795.680,00	10.714.680,00	99,25
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	13.761.600.000,00	13.658.600.000,00	99,25
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	11.682.000.000,00	11.594.500.000,00	99,25
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	11.682.000.000,00	11.594.500.000,00	99,25
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	33.300.000,00	2.250.000,00	6,76
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	33.300.000,00	2.250.000,00	6,76
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00

2025

2024

3.1.1.1.2 **Belanja Barang dan Jasa** **Rp62.767.761.808,00** **Rp65.956.292.952,00**

Belanja Barang dan Jasa Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp74.734.179.170,00 dengan realisasi sebesar Rp62.767.761.808,00 atau 83,99%. Realisasi belanja barang dan jasa Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 3.188.531.144 atau 4,83% dibandingkan realisasi belanja pegawai tahun 2024. Rincian realisasi belanja barang dan jasa sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		Rp	Rp	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.734.179.170,00	62.767.761.808,00	83,99
5.1.02.01	Belanja Barang	18.637.247.750,00	16.743.315.456,00	89,84
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.637.247.750,00	16.743.315.456,00	89,84
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.140.000,00	1.000.000,00	87,72
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	466.201.000,00	314.736.000,00	67,51
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.408.000,00	7.408.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	284.126.000,00	193.592.160,00	68,14
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	160.689.000,00	154.346.935,00	96,05
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	106.387.000,00	104.013.326,00	97,77
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.263.261.750,00	1.160.442.225,00	91,86

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		Rp	Rp	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.096.000,00	1.940.000,00	21,33
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	189.006.000,00	182.953.145,00	96,80
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	44.074.000,00	41.444.039,00	94,03
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	40.668.000,00	39.084.626,00	96,11
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	22.608.000,00	4.680.000,00	20,70
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	225.400.000,00	219.021.000,00	97,17
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	208.154.000,00	152.920.000,00	73,46
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	665.000,00	589.000,00	88,57
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	176.000,00	150.000,00	85,23
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.265.189.000,00	13.030.576.000,00	91,35
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	819.100.000,00	617.972.000,00	75,45
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	337.450.000,00	331.900.000,00	98,36
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	46.800.000,00	45.750.000,00	97,76
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	136.649.000,00	135.800.000,00	99,38
5.1.02.02	Belanja Jasa	26.580.469.420,00	24.891.806.399,00	93,65
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.373.922.420,00	17.225.492.489,00	93,75
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.200.000,00	13.200.000,00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.895.400.000,00	2.441.900.000,00	84,34
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	2.800.000,00	1.200.000,00	42,86
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	104.500.056,00	104.472.000,00	99,97
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	270.000.000,00	269.730.000,00	99,90
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.723.535.204,00	2.702.681.000,00	99,23
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	839.190.480,00	838.071.120,00	99,87
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.119.250.000,00	2.843.400.000,00	91,16
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	775.800.000,00	774.324.000,00	99,81
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.745.328.000,00	1.727.142.548,00	98,96
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	291.168.000,00	291.140.208,00	99,99
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	20.585.600,00	17.585.588,00	85,43
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	413.743.680,00	413.743.680,00	100,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.000.000,00	5.000.000,00	71,43
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	80.000.000,00	25.000.000,00	31,25
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	6.000.000,00	1.800.000,00	30,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	92.400.000,00	72.001.260,00	77,92

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		Rp	Rp	
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	1.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.285.795.000,00	3.230.740.496,00	98,32
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	8.028.000,00	3.041.099,00	37,88
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	280.800.000,00	181.527.500,00	64,65
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	876.935.500,00	824.981.127,00	94,08
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	159.588.000,00	141.504.000,00	88,67
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.350.000,00	36.205.817,00	89,73
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	15.000.000,00	10.884.646,00	72,56
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	37.404.900,00	28.415.400,00	75,97
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	220.000.000,00	176.681.000,00	80,31
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	16.020.000,00	16.020.000,00	100,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.536.980.000,00	2.439.430.000,00	96,15
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.033.458.000,00	990.700.000,00	95,86
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	110.130.000,00	91.242.000,00	82,85
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	812.448.000,00	795.708.000,00	97,94
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	570.836.000,00	552.470.000,00	96,78
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	10.108.000,00	9.310.000,00	92,11
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.320.300.000,00	1.282.200.000,00	97,11
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.320.300.000,00	1.282.200.000,00	97,11
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	76.800.000,00	76.590.000,00	99,73
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	76.800.000,00	76.590.000,00	99,73
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.874.307.000,00	1.727.497.910,00	92,17
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	124.841.600,00	123.819.400,00	99,18
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.747.462.500,00	1.601.675.610,00	91,66
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.002.900,00	2.002.900,00	100,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.398.160.000,00	2.140.596.000,00	89,26
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	335.660.000,00	225.000.000,00	67,03
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.062.500.000,00	1.915.596.000,00	92,88
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	556.826.000,00	494.211.643,00	88,76
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	373.137.000,00	312.924.956,00	83,86
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	20.000.000,00	19.869.000,00	99,35

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		Rp	Rp	
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	24.632.000,00	23.916.000,00	97,09
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.750.000,00	3.512.793,00	52,04
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	119.200.000,00	78.422.163,00	65,79
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.250.000,00	16.930.000,00	83,60
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8.930.000,00	4.875.000,00	54,59
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	77.840.000,00	76.050.000,00	97,70
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	6.390.000,00	6.300.000,00	98,59
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	3.120.000,00	3.000.000,00	96,15
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	335.000,00	325.000,00	97,01
5.1.02.03.02.0290	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	69.130.000,00	63.975.000,00	92,54
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	16.560.000,00	15.750.000,00	95,11
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	172.689.000,00	170.652.787,00	98,82
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	172.689.000,00	170.652.787,00	98,82
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.000.000,00	10.633.900,00	96,67
5.1.02.03.04.0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	11.000.000,00	10.633.900,00	96,67
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.959.636.000,00	20.638.428.310,00	71,27
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.959.636.000,00	20.638.428.310,00	71,27
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.607.036.000,00	13.411.168.310,00	62,07
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.311.600.000,00	7.186.260.000,00	98,29
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	41.000.000,00	41.000.000,00	100,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	0,00	0,00	0,00

2025

2024

3.1.1.2 Belanja Modal Rp111.764.962.684,00 Rp699.951.472,00

Belanja Modal Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp199.149.510.000,00 dengan realisasi sebesar Rp111.764.962.684,00 atau 56,12%.. Realisasi belanja modal Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp111.065.011.212.00 dibandingkan realisasi belanja modal tahun 2024. Realisasi belanja modal tahun 2025 semuanya menambah atau membentuk Aset Tetap dan Aset Lainnya. Rincian realisasi belanja modal sebagai berikut:

2025

2024

3.1.1.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Rp2.066.149.327,00 Rp305.724.000,00 Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.128.890.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.066.149.327,00 atau 97,05%. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.760.425.327 dibandingkan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024. Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		Rp	Rp	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.128.890.000,00	2.066.149.327,00	97,05
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	570.840.000,00	560.950.000,00	98,27

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		Rp	Rp	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	570.840.000,00	560.950.000,00	98,27
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	549.340.000,00	539.450.000,00	98,20
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	21.500.000,00	21.500.000,00	100,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.558.050.000,00	1.505.199.327,00	96,61
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.549.550.000,00	1.496.700.057,00	96,59
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	188.300.000,00	182.200.002,00	96,76
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.361.250.000,00	1.314.500.055,00	96,57
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.500.000,00	8.499.270,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.500.000,00	8.499.270,00	0,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00

2025

2024

3.1.1.2.2 Belanja Modal

Gedung dan

Rp109.687.339.757,00

Rp375.703.672,00

Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp197.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp109.687.339.757,00 atau 55,68%. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp109.311.636.085 dibandingkan Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan memiliki realisasi sebesar 55,68% hal ini dikarenakan pembayaran termin II tidak dapat dilaksanakan karena belum mencapai target fisik 55% sesuai kontrak.

2025

2024

3.1.1.2.3 Belanja Modal

Aset Tetap

Rp11.473.600,00

Rp18.523.800,00

Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp20.620.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.473.600,00 atau 55,64%. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran

2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.050.200 atau 38,06% dibandingkan realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2024. Penurunan realisasi belanja modal aset tetap lainnya dikarenakan belanja modal buku umum dan belanja modal buku ilmu sosial sesuai dengan kebutuhan dan adanya selisih harga pada mbiz market. Rincian realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		Rp	Rp	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.620.000,00	11.473.600,00	55,64
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	20.620.000,00	11.473.600,00	55,64
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	20.620.000,00	11.473.600,00	55,64
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	6.168.000,00	2.712.000,00	43,97
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	14.452.000,00	8.761.600,00	60,63

2025 **2024**

3.1.2. Aset **Rp 188.997.609.399,76** **Rp 84.023.423.058,93**

Aset Sekretariat DPRD DIY per 31 Desember 2025 sebesar Rp188.997.609.399,76 mengalami peningkatan sebesar Rp104.974.186.340,83 atau 124,93% dibandingkan dengan Aset Tahun 2024. Aset Sekretariat DPRD DIY terdiri dari:

2025 **2024**

3.1.2.1. Aset Lancar **Rp283.959.687,00** **Rp126.293.899,00**

Aset Lancar Sekretariat DPRD DIY Per 31 Desember 2025 sebesar Rp283.959.687,00 mengalami peningkatan sebesar Rp157.665.788 atau 124,84% dibandingkan Aset Lancar Tahun 2024. Aset Lancar Sekretariat DPRD DIY terdiri dari:

2025 **2024**

3.1.2.1.1. Kas dan Setara **Rp0,00** **Rp0,00**

Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Sedangkan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00.

2025 **2024**

3.1.2.1.2. Persediaan **Rp283.959.687,00** **Rp126.293.899,00**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp283.959.687,00 mengalami peningkatan sebesar Rp157.665.788,00 atau 124,84% dibandingkan dengan Persediaan Tahun 2024. Persediaan Sekretariat DPRD DIY terdiri dari:

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Naik/Turun	↑/↓
		Rp	Rp	Rp	
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	283.959.687,00	126.293.899,00	157.665.788,00	↓
1.1.12.01.01	Bahan	3.025.000,00	14.482.588,00	(11.457.588,00)	↓
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	250.000,00	4.647.000,00	(4.397.000,00)	↓
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	0,00	
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	7.060.588,00	(7.060.588,00)	↓
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	2.775.000,00	2.775.000,00	-	
1.1.12.01.02	Suku Cadang	-	-	0,00	
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	0,00	
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	280.659.687,00	111.536.311,00	169.123.376,00	↑
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	20.838.998,00	18.219.048,00	2.619.950,00	↑
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	9.374.500,00	9.045.500,00	329.000,00	↑
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	102.232.721,00	30.490.225,00	71.742.496,00	↑
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	1.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	↓
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	10.203.000,00	10.275.100,00	(72.100,00)	↓
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	0	0,00	-	↓
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	2.486.000,00	2.486.000,00	-	
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	-	0	0,00	
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	121.213.030,00	19.014.000,00	102.199.030,00	↑
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.311.438,00	20.006.438,00	(6.695.000,00)	↓
1.1.12.01.06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	275.000,00	275.000,00	-	
1.1.12.01.06.0002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	275.000,00	275.000,00	-	

Berikut merupakan detail perubahan nilai Persediaan pada Tahun Anggaran 2025:

Kode Barang	Nama Barang	Saldo Awal	Masuk	Keluar	Saldo Akhir
1.1.7.01.01.02	BAHAN KIMIA	4.647.000,00	1.000.000,00	5.397.000,00	250.000,00
1.1.7.01.01.04	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	0,00	314.736.000,00	314.736.000,00	0,00
1.1.7.01.01.09	ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	7.060.588,00	7.408.000,00	14.468.588,00	0,00
1.1.7.01.01.12	BAHAN LAINNYA	2.775.000,00	2.997.000,00	2.997.000,00	2.775.000,00
1.1.7.01.02.01	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN	0,00	193.592.160,00	193.592.160,00	0,00
1.1.7.01.03.01	ALAT TULIS KANTOR	18.219.048,00	154.346.935,00	151.726.985,00	20.838.998,00
1.1.7.01.03.02	KERTAS DAN COVER	9.045.500,00	104.013.326,00	103.684.326,00	9.374.500,00
1.1.7.01.03.03	BAHAN CETAK	30.490.225,00	1.160.442.225,00	1.088.699.729,00	102.232.721,00
1.1.7.01.03.04	BENDA POS	2.000.000,00	1.940.000,00	2.940.000,00	1.000.000,00
1.1.7.01.03.06	BAHAN KOMPUTER	10.275.100,00	182.953.145,00	183.025.245,00	10.203.000,00
1.1.7.01.03.07	PERABOT KANTOR	0,00	41.444.039,00	41.444.039,00	0,00
1.1.7.01.03.08	ALAT LISTRIK	2.486.000,00	39.084.626,00	39.084.626,00	2.486.000,00
1.1.7.01.03.09	PERLENGKAPAN DINAS	0,00	518.130.000,00	518.130.000,00	0,00
1.1.7.01.03.12	SUVENIR/CENDERA MATA	19.014.000,00	219.021.000,00	116.821.970,00	121.213.030,00
1.1.7.01.03.13	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	20.006.438,00	152.920.000,00	159.615.000,00	13.311.438,00

Kode Barang	Nama Barang	Saldo Awal	Masuk	Keluar	Saldo Akhir
1.1.7.01.04.01	OBAT	0,00	589.000,00	589.000,00	0,00
1.1.7.01.04.02	OBAT-OBATAN LAINNYA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.7.01.06.02	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA LAINNYA	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00

Saldo persediaan tahun 2025 berasal dari Saldo awal tahun 2025 dan Belanja Barang Pakai Habis tahun 2025 kecuali belanja makan dan minum, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Saldo awal persediaan tahun 2025 sebesar Rp126.293.899,00
- b. Mutasi masuk sebesar Rp3.094.767.456,00
berasal dari :
 - belanja barang persediaan sebesar Rp3.094.767.456,00
- c. mutasi keluar sebesar (Rp2.937.101.668,00)
berasal dari :
 - beban persediaan sebesar (Rp2.937.101.668,00)
- d. Saldo akhir persediaan sebesar Rp283.959.687,00

	2025	2024
3.1.2.2. <u>Aset Tetap</u>	<u>Rp187.796.402.967,76</u>	<u>Rp82.772.819.914,93</u>

Aset Tetap Sekretariat DPRD DIY per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp187.796.402.967,76 mengalami peningkatan sebesar Rp105.023.583.052,83 atau 126,88% dibandingkan Aset Tetap tahun 2024. Peningkatan aset tetap berasal dari belanja modal aset tetap, mutasi masuk dari BPKA, dan Hibah dari RRI. Namun ada pengurangan Aset Tetap berasal dari adanya Usulan Penghapusan Aset Tetap dan mutasi keluar ke BPKA. Aset Tetap Sekretariat DPRD DIY terdiri dari:

	2025	2024
3.1.2.2.1 <u>Peralatan dan Mesin</u>	<u>Rp22.950.952.225,27</u>	<u>Rp25.531.606.036,09</u>

Saldo Peralatan dan Mesin Sekretariat DPRD DIY per 31 Desember 2025 sebesar Rp22.950.952.225,27. Peralatan dan Mesin Sekretariat DPRD DIY per 31 Desember 2025 mengalami Penurunan sebesar Rp2.580.653.810,82 atau 89,89% dari Tahun 2024. Saldo Peralatan dan Mesin tahun 2025 berasal dari Saldo awal tahun 2025, Mutasi Bertambah, dan Mutasi Berkurang. Mutasi bertambah pada saldo peralatan dan mesin berasal dari Pendapatan Hibah (Hibah Masuk) berasal dari Radio Republik

Indonesia (RRI) berupa Radio DAB + berjumlah 4 dan Radio DRM berjumlah 1 pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025, dan Mutasi Masuk dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY (BPKA DIY) berupa IPAD 10 Unit pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025. Sedangkan untuk Mutasi Berkurang / Pengurang saldo Peralatan dan Mesin berasal dari Usulan Penghapusan Tahun Anggaran 2025, Mutasi Keluar berupa Mobil Sedan dan IPAD 45 Unit dari Sekretariat DPRD DIY ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY (BPKA DIY) dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal Peralatan dan Mesin Tahun 2025	Rp25.531.606.036,09
---	---------------------

Penambah Peralatan dan Mesin, berasal dari:	Rp2.352.049.327,00
---	--------------------

- | | | |
|---|---|--------------------|
| 1 | Penambahan dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 | Rp2.066.149.327,00 |
| 2 | Pendapatan Hibah (Hibah Masuk) dari RRI ke Sekretariat DPRD DIY Triwulan II | Rp17.250.000,00 |
| 3 | Mutasi Masuk IPAD 10 Unit dari BPKA ke Sekretariat DPRD DIY Triwulan IV | Rp268.650.000,00 |

Pengurang Peralatan dan Mesin, berasal dari	(Rp4.932.703.137,82)
---	----------------------

- | | | |
|---|---|----------------------|
| 1 | Usulan Penghapusan Kursi pada Triwulan I | (Rp24.600.000,00) |
| 2 | Usulan Penghapusan Peralatan dan Mesin pada Triwulan II | (Rp961.416.099,22) |
| 3 | Usulan Penghapusan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada Triwulan II | (Rp1.810.702.380,60) |
| 4 | Usulan Penghapusan Peralatan dan Mesin Triwulan III | (Rp 332.879.658,00) |

- 5 Mutasi Keluar Mobil Sedan (Rp594.180.000,00)
dari Sekretariat DPRD DIY
ke BPKA Triwulan I
- 6 Mutasi Keluar IPAD 45 Unit (Rp1.208.925.000,00)
dari Sekretariat DPRD DIY
ke BPKA Triwulan III

Saldo Akhir Peralatan dan Mesin Tahun 2025

Rp22.950.952.225,27

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp22.950.952.225,27 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Naik/Turun
		Rp	Rp	Rp
1.3.02.01	Alat Besar	1.098.380.700,00	1.098.380.700,00	-
1.3.02.02	Alat Angkutan	5.318.776.854,00	7.739.164.234,60	2.420.387.380,60
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.000.000,00	15.100.000,00	11.100.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.317.740.520,01	7.233.462.309,01	915.721.789,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.087.465.376,00	4.688.285.556,00	(399.179.820,00)
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	43.454.545,50	43.454.545,50	-
1.3.02.10	Komputer	4.954.638.229,76	4.587.262.690,98	(367.375.538,78)
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	56.350.000,00	56.350.000,00	-
1.3.02.18	Rambu-rambu	50.200.000,00	50.200.000,00	-
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	19.946.000,00	19.946.000,00	-

2025

2024

3.1.2.2.2. Gedung dan Bangunan Rp576.741.303.378,00 Rp576.741.303.378,00

Saldo Gedung dan Bangunan Sekretariat DPRD DIY per 31 Desember 2025 sebesar Rp576.741.303.378,00. Saldo Gedung dan Bangunan Sekretariat DPRD DIY tahun 2025 berasal dari Saldo awal tahun 2025, Mutasi Bertambah, dan Mutasi Berkurang. Saldo awal Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp576.741.303.378,00 dan mutasi bertambah berasal dari belanja modal gedung dan bangunan tahun 2025 sebesar Rp109.687.339.757,00. Sedangkan mutasi berkurang berasal dari reklas dari kode belanja Gedung dan Bangunan ke Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp 109.687.339.757,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 Rp576.741.303.378,00

Penambah Gedung dan Bangunan, berasal dari: Rp109.687.339.757,00

1 Penambahan dari Realisasi

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 Rp109.687.339.757,00

Pengurang Gedung dan Bangunan, berasal dari (Rp109.687.339.757,00)

1 Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) (Rp109.687.339.757,00)

Saldo Akhir Peralatan dan Mesin Tahun 2025 Rp576.741.303.378,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo akhir Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp576.741.303.378,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Naik/Turun	↑/↓
		Rp	Rp	Rp	
1.3.03	Gedung dan Bangunan	576.741.303.378,00	576.741.303.378,00	-	
1.3.03.01	Bangunan Gedung	576.636.215.660,00	576.636.215.660,00	-	
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	576.636.215.660,00	576.636.215.660,00	-	
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	573.988.851.433,00	573.988.851.433,00	-	
1.3.03.01.01.0004	Bangunan Gedung Instalasi	41.500.000,00	41.500.000,00		
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.695.044.000,00	1.695.044.000,00	-	
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	222.279.200,00	222.279.200,00	-	
1.3.03.01.01.0036	Taman	688.091.027,00	688.091.027,00	-	
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	105.087.718,00	105.087.718,00	-	
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	105.087.718,00	105.087.718,00	-	
1.3.03.04.01.0004	Pagar	105.087.718,00	105.087.718,00	-	

	2025	2024
3.1.2.2.3. <u>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</u>	<u>Rp736.629.559,00</u>	<u>Rp736.629.559,00</u>

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Sekretariat DPRD DIY per 31 Desember 2025 sebesar Rp736.629.559,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Naik/Turun	↑/↓
		Rp	Rp	Rp	
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	736.629.559,00	736.629.559,00	-	
1.3.04.02	Bangunan Air	214.497.800,00	214.497.800,00	-	
1.3.04.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	214.497.800,00	214.497.800,00	-	
1.3.04.02.02.0008	Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	214.497.800,00	214.497.800,00	-	
1.3.04.03	Instalasi	224.103.100,00	224.103.100,00	-	
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	194.873.100,00	194.873.100,00	-	
1.3.04.03.01.0001	Instalasi Air Permukaan	160.073.100,00	160.073.100,00	-	
1.3.04.03.01.0004	Instalasi Air Tanah Dangkal	34.800.000,00	34.800.000,00	-	
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	29.230.000,00	29.230.000,00	-	
1.3.04.03.06.0002	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	29.230.000,00	29.230.000,00	-	
1.3.04.04	Jaringan	298.028.659,00	298.028.659,00	-	
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	14.544.000,00	14.544.000,00	-	
1.3.04.04.01.0002	Jaringan Induk Distribusi	14.544.000,00	14.544.000,00	-	
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	283.484.659,00	283.484.659,00	-	
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	283.484.659,00	283.484.659,00	-	

2025

2024

3.1.2.2.4. Aset Tetap Lainnya Rp863.264.952,01 Rp855.691.352,01

Aset Tetap Lainnya pada Sekretariat DPRD DIY per 31 Desember 2025 sebesar 863.264.952,01. Aset Tetap Lainnya Sekretariat DPRD DIY per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp7.573.600 atau 0,89% dari Tahun 2024. Saldo Aset Tetap Lainnya tahun 2025 berasal dari Saldo awal tahun 2025, Mutasi Bertambah, dan Mutasi Berkurang. Mutasi bertambah pada saldo Aset Tetap Lainnya berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2025 sebesar Rp11.473.600,00 Sedangkan untuk Mutasi Berkurang Aset Tetap Lainnya berasal dari Usulan Penghapusan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 berupa Usulan Penghapusan Lukisan, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 Rp855.691.352,01

Penambah Aset Tetap Lainnya, berasal dari: Rp11.473.600,00

1 Penambahan dari Realisasi Rp11.473.600,00
 Belanja Modal Aset Tetap
 Lainnya Tahun 2025

Pengurang Gedung dan Bangunan, berasal dari (Rp3.900.000,00)

1 Usulan Penghapusan Aset (Rp3.900.000,00)
Tetap Lainnya – Lukisan
Triwulan II Tahun Anggaran
2025

Saldo Akhir Peralatan dan Mesin Tahun 2025

Rp863.264.952,01

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp863.264.952,01 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Naik/Turun	↑/↓
		Rp	Rp	Rp	
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	863.264.952,01	855.691.352,01	7.573.600,00	↑
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	679.356.052,01	667.882.452,01	11.473.600,00	↑
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	679.356.052,01	667.882.452,01	11.473.600,00	↑
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	428.019.742,00	425.307.742,00	2.712.000,00	↑
1.3.05.01.01.0003	Buku Agama	12.170.660,00	12.170.660,00	-	
1.3.05.01.01.0004	Buku Ilmu Sosial	226.291.750,01	217.530.150,01	8.761.600,00	↑
1.3.05.01.01.0007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	12.873.900,00	12.873.900,00	-	
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	66.526.900,00	70.426.900,00	(3.900.000,00)	↓
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	3.600.000,00	7.500.000,00	(3.900.000,00)	↓
1.3.05.02.01.0002	Lukisan	3.600.000,00	7.500.000,00	(3.900.000,00)	↓
1.3.05.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	62.926.900,00	62.926.900,00	-	
1.3.05.02.02.0001	Pahatan	42.000.000,00	42.000.000,00	-	
1.3.05.02.02.0002	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	4.606.900,00	4.606.900,00	-	
1.3.05.02.02.0003	Barang Kerajinan	16.320.000,00	16.320.000,00	-	
1.3.05.05	Tanaman	117.382.000,00	117.382.000,00	-	
1.3.05.05.01	Tanaman	117.382.000,00	117.382.000,00	-	
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	117.382.000,00	117.382.000,00	-	

2025

2024

Konstruksi

3.1.2.2.5. Dalam Pengerjaan **Rp111.895.403.679,00** **Rp2.208.063.922,00**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Sekretariat DPRD DIY per 31 Desember 2025 sebesar Rp111.895.403.679,00,00. Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp109.687.339.757,00 dibandingkan tahun 2024. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2025 berasal dari Saldo awal tahun 2025 dan mutasi Bertambah. Saldo awal Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.208.063.922,00. Mutasi Bertambah pada Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari hasil Reklasifikasi Bangunan Gedung Kantor menjadi Konstruksi Dalam Bangunan sebesar Rp 109.687.339.757,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025	Rp2.208.063.922,00
Penambah Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp109.687.339.757,00
1 Reklasifikasi Bangunan Rp109.687.339.757,00 Gedung Kantor menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	
Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025	Rp111.895.403.679,00

a. Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja berupa Bangunan Gedung Kantor DPRD DIY sebesar Rp111.895.403.679,00. Mutasi bertambah dari hasil reklasifikasi Bangunan Gedung Kantor menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berupa Belanja Bnagunan Gedung Kantor sebesar Rp 109.687.339.757,00. Tahapan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja berupa Bangunan Gedung Kantor terdiri dari: Tahapan Perencanaan (Penyusunan DED Gedung DPRD DIY telah dilaksanakan pada tahun 2022, Tahapan Penyusunan Dokumen AMDAL dan Andalalin Pembangunan Gedung DPRD DIY telah dilaksanakan pada tahun 2023, Tahapan Pengawasan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung DPRD DIY dan Tahapan Konstruksi Bangunan Gedung DPRD DIY masih berlangsung sampai dengan tahun 2026.

b. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 – 2025

Berikut Rincian Pengerjaan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Bangunan Gedung Kantor DPRD DIY Tahun 2022 – 2025:

No	Pembangunan Gedung DPRD DIY	Kontrak berakhir	Realisasi
1	Biaya Perencanaan (Penyusunan DED Gedung DPRD DIY Tahun 2022) Dilaksanakan oleh PT. Fasade Kobetama tanggal Internasional KSO PT Tri Patra Konsultan dengan SPK Nomor 027/02974 tanggal 08 April 2022	Tahun 2022	Rp1.022.754.000

2	Biaya Penyusunan Dokumen AMDAL dan Andalalin Pembangunan Gedung DPRD DIY Dilaksanakan oleh CV. Alam Raya Utama Sejahtera dengan Nomor SPK 027/03682 tanggal 18 April 2023	Tahun 2023	Rp809.606.250
3	Biaya Pengawasan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung DPRD DIY Dilaksanakan PT Biro Arsitek dan Insinjur Sangkuriang KSO PT Arss Baru dengan SPK nomor 000.3.3.3/8246 tanggal 13 Agustus 2024	07 Desember 2026	Rp2.525.111.250
4	Biaya Konstruksi Bangunan Gedung DPRD DIY Dilaksanakan oleh Waskita-Citra KSO dengan SPK Nomor 000.3/3327 tanggal 12 Maret 2025	07 Desember 2026	Rp107.306.779.312
5	Biaya Pendukung Tahun 2024 - 2025	2024	Rp43.425.172
		2025	Rp187.727.695

c. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025

Berikut Rincian Realisasi Pengerjaan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Bangunan Gedung Kantor DPRD DIY Tahun Anggaran 2025:

No	Pembangunan Gedung DPRD DIY	Kontrak berakhir	Anggaran	Realisasi
1	Biaya Pengawasan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung DPRD DIY Dilaksanakan PT Biro Arsitek dan Insinjur Sangkuriang KSO PT Arss Baru dengan SPK nomor 000.3.3.3/8246 tanggal 13 Agustus 2024	07 Desember 2026	Rp7.380.234.719	Rp2.192.832.750
2	Biaya Konstruksi Bangunan Gedung DPRD DIY Dilaksanakan oleh Waskita-Citra KSO dengan SPK Nomor 000.3/3327 tanggal 12 Maret 2025	07 Desember 2026	Rp371.005.029.205	Rp107.306.779.312
3	Biaya Pendukung Tahun 2025	Tahun 2025	Rp298.719.000	Rp187.727.695
Total				Rp109.687.339.757

2025

2024

**3.1.2.2.6. Akumulasi
Penyusutan (Rp525.391.150.825,52) (Rp523.300.474.332,17)**

Saldo Akumulasi Penyusutan Sekretariat DPRD DIY per 31 Desember 2025 sebesar (Rp525.391.150.825,52). Akumulasi Penyusutan Sekretariat DPRD DIY per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.090.676.493,35 atau 0,40% dari Tahun 2024. Saldo akhir Akumulasi Penyusutan tahun anggaran 2025 berasal dari Saldo awal tahun 2025, Mutasi Bertambah, dan Mutasi Berkurang. Mutasi bertambah pada saldo Akumulasi Penyusutan berasal dari Beban penyusutan tahun anggaran 2025 sebesar Rp6.182.781.783,77 dan Mutasi Masuk IPAD 10 Unit dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA DIY) sebesar Rp268.650.000,00. Sedangkan Mutasi Berkurang Akumulasi Penyusutan berasal dari Usulan Penghapusan Tahun Anggaran 2025, Mutasi keluar berupa mobil sedan sebesar Rp445.635.000,00 dan IPAD 45 Unit sebesar Rp1.208.925.000,00 dari Sekretariat DPRD DIY ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA DIY), dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	Rp523.300.474.332,17
Penambah Akumulasi Penyusutan, berasal dari:	Rp6.451.431.783,77
1 Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	Rp6.182.781.783,77
2 Mutasi Masuk dari BPKA ke Sekretariat DPRD DIY berupa 10 IPAD	Rp268.650.000
Pengurang Akumulasi Penyusutan, berasal dari:	(Rp4.360.755.290,42)
1 Usulan Penghapusan Barang Triwulan I Tahun 2025	(Rp24.600.000,00)
2 Usulan Penghapusan Barang Peralatan dan Mesin Triwulan II Tahun 2025	(Rp960.875.471,82)
3 Usulan Penghapusan Barang Kendaraan Dinas Bermotor Triwulan II Tahun 2025	(Rp1.387.840.160,60)
4 Usulan Penghapusan Barang Triwulan III	(Rp332.879.658,00)

5 Mutasi Keluar berupa Mobil (Rp445.635.000)
Sedan dari Sekretariat DPRD
DIY ke BPKA Triwulan I

6 Mutasi Keluar berupa IPAD (Rp1.208.925.000)
45 Unit dari Sekretariat
DPRD DIY ke BPKA Triwulan
III

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 (Rp525.391.150.825,52)

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo akhir Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp525.391.150.825,52 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
		Rp	Rp
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(525.391.150.825,52)	(523.300.474.332,17)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(19.303.623.518,46)	(22.221.228.719,03)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(505.805.068.112,42)	(500.815.874.810,98)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(282.459.194,64)	(263.370.802,16)

2025 **2024**

3.1.2.3. Aset Lainnya Rp917.246.745,00 Rp1.124.309.245,00

Aset Lainnya pada Sekretariat DPRD DIY per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp917.246.745,00 dengan rincian sebagai berikut:

2025 **2024**

3.1.2.3.1. Aset Tak Berwujud Rp917.246.745,00 Rp917.246.745,00

Saldo Aset Tak Berwujud Sekretariat DPRD DIY per 31 Desember 2025 sebesar Rp917.246.745,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2025	2024	Naik/Turun
	Rp	Rp	Rp
Aset Tidak Berwujud	917.246.745,00	917.246.745,00	-
Aset Tidak Berwujud	917.246.745,00	917.246.745,00	-
Software	209.218.745,00	209.218.745,00	-
Kajian	519.036.200,00	519.036.200,00	-
Aset Tidak Berwujud Lainnya	188.991.800,00	188.991.800,00	-

a. Software sebesar Rp209.218.745,00 berupa:

- Software/Aplikasi Program Rp 14.500.000,00

- Website dan SMS Gateway Rp15.000.000,00
 - Software/Aplikasi Data Centre Aplikasi Rp108.218.745,00
 - Software Aplikasi Mobile Web Rp38.675.000,00
 - Aplikasi E-Library Rp32.825.000,00
- b. Kajian sebesar Rp519.036.200,00 berupa:
- Kajian Kebijakan Kesehatan Rp44.800.000,00
 - Kajian Kebijakan Pendidikan Rp44.500.000,00
 - Kajian Penyusunan Raperda Jasa Konsultasi Rp334.911.200,00
 - Kajian Sumber Daya Air Tanah Rp28.275.000,00
 - Pedoman Rekrutmen TAF dan Kelompok Pakar Rp36.750.000,00
 - Kajian Optimalisasi Pengelolaan Transportasi Perkotaan Rp29.800.000,00
- c. Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp188.991.800 berupa:
- Layanan Informasi Melalui Website Rp94.869.800,00
 - Service Software Website dan SMS Gateway Rp14.982.000,00
 - Naskah Akademik Pembentukan dan Pengelolaan BLUD Rp49.240.000,00
 - Naskah Akademik Optimalisasi Pengelolaan Lingkungan Rp29.900.000,00

	2025	2024
3.1.2.3.2. <u>Aset Lain-lain</u>	<u>Rp15.505.000,00</u>	<u>Rp1.286.566.933,00</u>
Saldo Aset Lain-lain Sekretariat DPRD DIY per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.505.000. Aset Lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp 1.271.061.933 yang berasal dari:		
Saldo Awal Aset Lain-Lain Tahun 2025		Rp1.286.566.933,00
Penambah Aset Lain-lain		Rp3.108.898.137,00
1 Nilai Perolehan Aset Rusak Berat Usulan Penghapusan Barang Triwulan II	Rp2.776.018.479,00	
2 Nilai Perolehan Usulan Penghapusan Barang Triwulan II	Rp332.879.658,00	
Pengurang Aset Lain-lain		(Rp4.379.960.070,00)
1 Muncul SK Penghapusan Barang Triwulan I No. atas No. 16/SEKDA/II/2025 dan No. 21/SEKDA/III/2025	(Rp1.286.566.933,00)	

	Usulan Penghapusan Barang Tahun 2024	
2	Muncul SK Penghapusan Barang Triwulan III No. 42/SEKDA/VII/2025 atas Usulan Penghapusan Barang Tahun 2025	(Rp2.760.513.479,00)
3	Muncul SK Penghapusan Barang Triwulan IV No. 60/SEKDA/X/2025 atas Usulan Penghapusan Barang Tahun 2025	(Rp332.879.658,00)
	Saldo Akhir Aset Lain-Lain Tahun 2025	Rp15.505.000,00

	2025	2024
	<u>Akumulasi</u>	
3.1.2.3.3.	<u>Penyusutan</u>	<u>(Rp15.505.000,00)</u>
	<u>Aset Lainnya</u>	<u>(Rp1.079.504.433,00)</u>

Saldo Akumulasi Aset Lain-lain Sekretariat DPRD DIY per 31 Desember 2025 sebesar (Rp15.505.000,00) mengalami penurunan sebesar Rp1.063.999.422,00 dibandingkan dengan tahun 2024 yang berasal dari:

	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2025	Rp1.079.504.433,00
	Penambah Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Rp2.681.595.290,42
1	Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Berdasarkan Usulan Penghapusan Triwulan II	Rp2.348.715.632,42
2	Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Berdasarkan Usulan Penghapusan Triwulan III	Rp332.879.658,00
	Pengurang Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(Rp3.745.594.723,42)
1	Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Triwulan I SK Penghapusan Barang No. 16/SEKDA/II/2025 dan No. 21/SEKDA/III/2025 atas Usulan Penghapusan	(Rp1.079.504.433,00)
2	Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Triwulan III SK No. 42/SEKDA/VII/2025 Penghapusan Barang atas Usulan	(Rp2.333.210.632,42)

- 3 Nilai Akumulasi Penyusutan (Rp332.879.658,00)
Aset Lainnya Triwulan IV SK
Penghapusan Barang No
60/SEKDA/X/2025 atas Usulan
Penghapusan
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2025 (Rp15.505.000,00)

	2025	2024
3.1.3. <u>Kewajiban</u>	<u>Rp80.648.983,00</u>	<u>Rp82.623.813,00</u>

Saldo Kewajiban Sekretariat DPRD DIY per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp80.648.983,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.974.830,00 atau 2,39% dibandingkan Kewajiban tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
3.1.3.1 <u>Kewajiban</u>	<u>Rp80.648.983,00</u>	<u>Rp82.623.813,00</u>
<u>Jangka Pendek</u>		

Kewajiban Jangka Pendek Sekretariat DPRD DIY per 31 Desember 2025 sebesar Rp80.648.983,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.974.830,00 atau 2,39% dibandingkan Kewajiban Jangka Pendek tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
3.1.3.1.1. <u>Utang Belanja</u>	<u>Rp80.648.983,00</u>	<u>Rp82.623.813,00</u>

Saldo Utang Belanja Sekretariat DPRD per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp80.648.983,00 merupakan kewajiban atas layanan barang/jasa yang telah dikonsumsi oleh SKPD namun sampai dengan per 31 Desember 2025 belum dibayar oleh SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Naik/Turun
		Rp	Rp	Rp
2.1.06	Utang Belanja	80.648.983,00	82.623.813,00	(1.974.830,00)
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	80.648.983,00	82.623.813,00	(1.974.830,00)
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	80.648.983,00	82.623.813,00	(1.974.830,00)
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	239.589,00	299.007,00	(59.418,00)
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	10.824.500,00	16.040.400,00	(5.215.900,00)
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	69.584.894,00	66.284.406,00	3.300.488,00

	2025	2024
3.1.4. <u>Ekuitas</u>	<u>Rp188.916.960.416,76</u>	<u>Rp83.940.799.245,93</u>

Saldo ekuitas sebesar Rp188.916.960.416,76 merupakan kekayaan bersih SKPD yang berasal dari selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD per 31 Desember 2025. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar, dengan rincian sebagai berikut:

Ekuitas Awal	:	Rp83.940.799.245,93
Surplus/Defisit - LO	:	(Rp123.356.447.755,17)
RK PPKD	:	Rp228.481.153.926,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	:	(Rp148.545.000,00)
Jumlah Ekuitas Akhir	:	<u>Rp188.916.960.416,76</u>

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp148.545.000,00 berasal dari:

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, berasal dari: Rp148.545.000,00

- 1 Mutasi Keluar Berupa Rp594.180.000,00
Mobil Sedan dari
Sekretariat DPRD DIY ke
BPKA DIY Triwulan I
- 2 Akumulasi Penyusutan (Rp445.635.000,00)
Mutasi Keluar Berupa
Mobil Sedan - Alat
Angkutan Darat Bermotor
– Kendaraan Dinas
Bermotor Perorangan
- 2 Mutasi Keluar Berupa Rp1.208.925.000,00
IPAD 45 Unit dari
Sekretariat DPRD DIY ke
BPKA DIY Triwulan III
- 3 Akumulasi Penyusutan (Rp1.208.925.000,00)
Mutasi Keluar Berupa
IPAD 45 Unit dari

Sekretariat DPRD DIY ke
BPKA DIY Triwulan III

- 4 Mutasi Masuk Berupa Rp268.650.000,00
IPAD 10 Unit dari BPKA ke
Sekretariat DPRD DIY
Triwulan IV
- 5 Akumulasi Penyusutan (Rp268.650.000,00)
Mutasi Masuk Berupa
IPAD 10 Unit dari BPKA
DIY ke Sekretariat DPRD
DIY

	2025	2024
3.1.5. <u>Pendapatan-LO</u>	<u>Rp17.250.000</u>	<u>0</u>
Realisasi Pendapatan-LO Sekretariat DPRD DIY sebesar Rp17.250.000,00 merupakan Pendapatan Hibah sebesar Rp17.250.000 berupa Radio DAB + berjumlah 4 dan Radio DRM berjumlah 1 pada Triwulan II Tahun 2025. yang berasal dari Radio Republik Indonesia (RRI) mengalami peningkatan sebesar Rp 17.250.000 dibandingkan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:		

	2025	2024
3.1.5.1 <u>Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Lo</u>	<u>Rp17.250.000</u>	<u>0</u>
Realisasi Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Pada Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp17.250.000 mengalami peningkatan sebesar Rp 17.250.000 dibandingkan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:		

	2025	2024
3.1.5.1.1 <u>Pendapatan Hibah</u>	<u>Rp17.250.000</u>	<u>0</u>
Realisasi Pendapatan Hibah Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp17.250.000 mengalami peningkatan sebesar Rp 17.250.000 dibandingkan tahun 2024. Pendapatan Hibah sebesar Rp17.250.000,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO berasal dari Republik Indonesia berupa Radio DAB + berjumlah 4 dan Radio DRM berjumlah 1 pada Triwulan II Tahun 2025.		

	2025	2024
3.1.6. <u>Beban</u>	<u>Rp122.739.332.407,77</u>	<u>Rp123.521.619.509,12</u>

Realisasi Beban Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp122.739.332.407,77 merupakan penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran, dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
3.1.6.1. <u>Beban</u>	<u>Rp116.556.550.624,00</u>	<u>Rp117.171.561.198,00</u>
 <u>Operasi</u>		

Realisasi Beban Operasi Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp116.556.550.624 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
3.1.6.1.1. <u>Beban Pegawai</u>	<u>Rp53.948.429.434,00</u>	<u>Rp51.207.971.633,00</u>

Realisasi Beban Pegawai Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp53.948.429.434,00. Beban Pegawai Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.740.457.801,00 atau 5,35% dibandingkan dengan beban pegawai tahun 2024. Beban Pegawai Sekretariat DPRD DIY dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
		Rp	Rp
8.1.01	Beban Pegawai	53.948.429.434,00	51.207.971.633,00
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.490.679.764,00	4.187.313.120,00
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	3.414.183.053,00	3.235.145.253,00
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.534.527.569,00	2.446.480.317,00
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	879.655.484,00	788.664.936,00
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	273.478.979,00	228.229.432,00
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	219.690.715,00	209.647.232,00
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	53.788.264,00	18.582.200,00
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	163.940.000,00	141.260.000,00
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	163.940.000,00	141.260.000,00
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	57.721.000,00	73.220.000,00
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	55.135.000,00	73.220.000,00
8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	2.586.000,00	0,00
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	86.080.000,00	78.865.000,00
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	86.080.000,00	78.865.000,00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	162.075.960,00	132.094.080,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
		Rp	Rp
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	123.693.360,00	117.754.920,00
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	38.382.600,00	14.339.160,00
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	34.110.843,00	18.178.067,00
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	34.110.843,00	18.178.067,00
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	42.122,00	31.427,00
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	33.414,00	28.199,00
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	8.708,00	3.228,00
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	271.703.508,00	255.610.424,00
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	222.170.196,00	216.808.896,00
8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	49.533.312,00	38.801.528,00
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.037.301,00	6.666.536,00
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.214.285,00	5.042.717,00
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.823.016,00	1.623.819,00
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	20.306.998,00	18.012.901,00
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	15.643.006,00	15.128.151,00
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	4.663.992,00	2.884.750,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.896.819.600,00	4.531.593.400,00
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.331.305.100,00	2.072.928.700,00
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.082.346.000,00	1.914.826.700,00
8.1.01.02.01.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	248.959.100,00	158.102.000,00
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	411.249.800,00	365.950.600,00
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	411.249.800,00	365.950.600,00
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.154.264.700,00	2.092.714.100,00
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.905.305.600,00	1.934.612.100,00
8.1.01.02.05.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	248.959.100,00	158.102.000,00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	66.200.000,00
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	53.720.000,00
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	53.720.000,00
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	12.480.000,00
8.1.01.03.08.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	12.480.000,00
8.1.01.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	44.200.930.070,00	42.122.865.113,00
8.1.01.04.01	Beban Uang Representasi DPRD	1.733.550.000,00	1.746.900.000,00
8.1.01.04.01.0001	Beban Uang Representasi DPRD	1.733.550.000,00	1.746.900.000,00
8.1.01.04.02	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	168.300.000,00	156.975.000,00
8.1.01.04.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	168.300.000,00	156.975.000,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
		Rp	Rp
8.1.01.04.03	Beban Tunjangan Beras DPRD	133.470.060,00	124.634.820,00
8.1.01.04.03.0001	Beban Tunjangan Beras DPRD	133.470.060,00	124.634.820,00
8.1.01.04.04	Beban Uang Paket DPRD	148.815.000,00	149.700.000,00
8.1.01.04.04.0001	Beban Uang Paket DPRD	148.815.000,00	149.700.000,00
8.1.01.04.05	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	2.513.647.500,00	2.533.005.000,00
8.1.01.04.05.0001	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	2.513.647.500,00	2.533.005.000,00
8.1.01.04.06	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	237.118.500,00	197.490.000,00
8.1.01.04.06.0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	237.118.500,00	197.490.000,00
8.1.01.04.07	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	50.416.500,00	71.466.150,00
8.1.01.04.07.0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	50.416.500,00	71.466.150,00
8.1.01.04.08	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	9.825.000.000,00	9.900.000.000,00
8.1.01.04.08.0001	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	9.825.000.000,00	9.900.000.000,00
8.1.01.04.09	Beban Tunjangan Reses DPRD	2.430.000.000,00	1.650.000.000,00
8.1.01.04.09.0001	Beban Tunjangan Reses DPRD	2.430.000.000,00	1.650.000.000,00
8.1.01.04.10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.542.016.370,00	89.403.123,00
8.1.01.04.10.0001	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.542.016.370,00	89.403.123,00
8.1.01.04.12	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	13.821.846.140,00	13.892.341.020,00
8.1.01.04.12.0001	Beban Jaminan Kesehatan DPRD	148.959.900,00	143.974.140,00
8.1.01.04.12.0002	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.571.560,00	3.591.720,00
8.1.01.04.12.0003	Beban Jaminan Kematian DPRD	10.714.680,00	10.775.160,00
8.1.01.04.12.0004	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	13.658.600.000,00	13.734.000.000,00
8.1.01.04.13	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	11.594.500.000,00	10.931.000.000,00
8.1.01.04.13.0001	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	11.594.500.000,00	10.931.000.000,00
8.1.01.04.14	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	2.250.000,00	679.950.000,00
8.1.01.04.14.0001	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	2.250.000,00	679.950.000,00
8.1.01.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	360.000.000,00	300.000.000,00
8.1.01.06.01	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	300.000.000,00
8.1.01.06.01.0001	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	300.000.000,00

2025

2024

3.1.6.1.2. Beban Barang dan Jasa

Rp62.608.121.190,00

Rp65.963.589.565,00

Realisasi Beban Barang dan Jasa Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp62.608.121.190,00. Beban Barang dan Jasa Sekretariat DPRD DIY

mengalami penurunan sebesar Rp3.355.468.375,00 atau 5,09% dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
		Rp	Rp
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	62.608.121.190,00	65.963.589.565,00
8.1.02.01	Beban Barang	16.585.649.668,00	13.434.357.398,00
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	16.585.649.668,00	13.433.859.398,00
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	5.397.000,00	9.478.000,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	314.736.000,00	485.874.100,00
8.1.02.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	14.468.588,00	7.037.054,00
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	2.997.000,00	7.112.436,00
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	193.592.160,00	143.154.425,00
8.1.02.01.01.0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	151.726.985,00	167.870.888,00
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	103.684.326,00	122.003.464,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.088.699.729,00	1.016.144.494,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.940.000,00	21.560.000,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	183.025.245,00	227.342.434,00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	41.444.039,00	33.073.699,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	39.084.626,00	48.893.664,00
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	518.130.000,00	653.655.000,00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	116.821.970,00	104.328.000,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	159.615.000,00	229.237.740,00
8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	589.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	150.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	13.030.576.000,00	9.573.679.000,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	617.972.000,00	583.415.000,00
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	498.000,00
8.1.02.01.04.0411	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	498.000,00
8.1.02.02	Beban Jasa	24.889.831.569,00	19.651.074.973,00
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	17.223.517.659,00	13.803.527.938,00
8.1.02.02.01.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.200.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.441.900.000,00	1.717.050.000,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
		Rp	Rp
8.1.02.02.01.0007	Beban Honorarium Rohaniwan	1.200.000,00	1.600.000,00
8.1.02.02.01.0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	21.000.000,00	21.000.000,00
8.1.02.02.01.0024	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	104.472.000,00	118.437.960,00
8.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	269.730.000,00	180.000.000,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	2.702.681.000,00	2.968.200.000,00
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	838.071.120,00	464.100.996,00
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	2.843.400.000,00	1.381.750.000,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	774.324.000,00	709.576.152,00
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.727.142.548,00	1.582.325.652,00
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	291.140.208,00	351.000.000,00
8.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	1.500.000,00
8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.500.000,00	411.180.000,00
8.1.02.02.01.0043	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	17.585.588,00	0,00
8.1.02.02.01.0045	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	413.743.680,00	0,00
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	5.000.000,00	5.000.000,00
8.1.02.02.01.0048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	25.000.000,00	27.000.000,00
8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.800.000,00	1.770.000,00
8.1.02.02.01.0052	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	72.001.260,00	60.000.000,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	3.230.740.496,00	2.365.135.000,00
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	2.981.681,00	3.775.653,00
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	176.311.600,00	204.841.900,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	828.281.615,00	828.696.635,00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	141.504.000,00	135.648.000,00
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	36.205.817,00	50.485.390,00
8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman	10.884.646,00	4.372.680,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	28.415.400,00	39.646.800,00
8.1.02.02.01.0069	Beban Pengolahan Air Limbah	9.600.000,00	9.600.000,00
8.1.02.02.01.0073	Beban Medical Check Up	176.681.000,00	159.835.120,00
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	16.020.000,00	0,00
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.439.430.000,00	1.338.957.000,00
8.1.02.02.04.0118	Beban Sewa Mebel	990.700.000,00	410.265.000,00
8.1.02.02.04.0123	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	91.242.000,00	74.592.000,00
8.1.02.02.04.0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	795.708.000,00	440.100.000,00
8.1.02.02.04.0133	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	552.470.000,00	402.600.000,00
8.1.02.02.04.0137	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	9.310.000,00	11.400.000,00
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.282.200.000,00	808.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
		Rp	Rp
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.282.200.000,00	800.700.000,00
8.1.02.02.05.0032	Beban Sewa Bangunan Fasilitas Umum	0,00	7.500.000,00
8.1.02.02.07	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	76.590.000,00	88.320.000,00
8.1.02.02.07.0057	Beban Sewa Tanaman	76.590.000,00	88.320.000,00
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.727.497.910,00	1.481.260.035,00
8.1.02.02.10.0003	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	123.819.400,00	74.991.600,00
8.1.02.02.10.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.601.675.610,00	1.406.268.435,00
8.1.02.02.10.0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.002.900,00	0,00
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.140.596.000,00	2.130.810.000,00
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	225.000.000,00	162.500.000,00
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	1.915.596.000,00	1.968.310.000,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	494.211.643,00	491.682.362,00
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	312.924.956,00	302.579.362,00
8.1.02.03.02.0022	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	19.869.000,00	19.894.500,00
8.1.02.03.02.0023	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	23.916.000,00	16.127.250,00
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.512.793,00	77.632.612,00
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	78.422.163,00	8.500.000,00
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	16.930.000,00	7.125.000,00
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.875.000,00	6.875.000,00
8.1.02.03.02.0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	8.400.000,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	76.050.000,00	67.350.000,00
8.1.02.03.02.0132	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	6.300.000,00	6.050.000,00
8.1.02.03.02.0134	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	3.000.000,00	1.650.000,00
8.1.02.03.02.0138	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	325.000,00	400.000,00
8.1.02.03.02.0290	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	0,00	5.625.000,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	63.975.000,00	63.900.000,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
		Rp	Rp
8.1.02.03.02.0406	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	15.750.000,00	13.050.000,00
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	170.652.787,00	178.503.000,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	170.652.787,00	178.503.000,00
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.633.900,00	10.600.000,00
8.1.02.03.04.0075	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	10.633.900,00	10.600.000,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	20.638.428.310,00	32.386.474.832,00
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.638.428.310,00	26.025.467.594,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	13.411.168.310,00	20.912.747.594,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.186.260.000,00	5.109.720.000,00
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	41.000.000,00	3.000.000,00
8.1.02.04.02	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	6.361.007.238,00
8.1.02.04.02.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	0,00	6.361.007.238,00

Terdapat selisih antara Belanja Barang dan Jasa dengan Beban Barang dan Jasa Sekretariat DPRD DIY sebagai berikut:

Beban Barang dan Jasa (LO)	Rp62.608.121.190,00
Belanja Barang dan Jasa (LRA)	<u>(Rp62.767.761.808,00)</u>
Selisih	(Rp159.640.618,00)

Beban Barang dan Jasa (LO) lebih kecil dari Belanja Barang dan Jasa (LRA) sebesar Rp159.640.618,00 berasal dari :

Penambah Beban Barang dan Jasa	Rp3.017.750.651,00
--------------------------------	--------------------

- 1 Pengakuan utang jasa Rp80.648.983,00
telephone, listrik, dan air
bulan Desember 2024
sehingga menambah
beban tahun 2025
- 2 Beban persediaan dari Rp2.937.101.668,00
saldo persediaan tahun
2025

Pengurang Beban Barang dan Jasa	(Rp3.177.391.269,00)
---------------------------------	----------------------

- 1 Belanja jasa telpon, listrik, (Rp82.623.813,00)
dan air bulan Desember
2024 sudah diakui Beban
pada Tahun 2024

Selisih Beban Barang dan Jasa	(Rp159.640.618,00)
-------------------------------	--------------------

2024

3.1.6.1.3.	<u>Penyusutan dan Amortisasi</u>	<u>Rp6.182.781.783,77</u>	<u>Rp6.350.058.311,12</u>
------------	---	----------------------------------	----------------------------------

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.174.500.089,85
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.989.193.301,44
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	19.088.392,48
Jumlah		6.182.781.783,77

Saldo ekuitas Sekretariat DPRD DIY sebesar Rp188.916.960.416,76 merupakan kekayaan bersih SKPD yang berasal dari selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD per 31 Desember 2025. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar dengan rincian sebagai berikut:

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar
Rp148.545.000.00 berasal dari:

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		Rp148.545.000,00
1 Mutasi Keluar Berupa Mobil Sedan dari Sekretariat DPRD DIY ke BPKA DIY Triwulan I	Rp594.180.000,00	
2 Akumulasi Penyusutan Mutasi Keluar Berupa Mobil Sedan - Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(Rp445.635.000,00)	
2 Mutasi Keluar Berupa IPAD 45 Unit dari Sekretariat DPRD DIY ke BPKA DIY Triwulan III	Rp1.208.925.000,00	
3 Akumulasi Penyusutan Mutasi Keluar Berupa IPAD 45 Unit dari Sekretariat DPRD DIY ke BPKA DIY DIY Triwulan III	(Rp1.208.925.000,00)	
4 Mutasi Masuk Berupa IPAD 10 Unit dari BPKA ke Sekretariat DPRD DIY Triwulan IV	Rp268.650.000,00	
5 Akumulasi Penyusutan Mutasi Masuk Berupa IPAD 10 Unit dari BPKA DIY ke Sekretariat DPRD DIY	(Rp268.650.000,00)	
Jumlah		(Rp148.545.000,00)

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik termasuk di dalamnya kelembagaan dan pembudayaan pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen menjadi komitmen bersama. Penyelenggaraan pemerintahan pada hakekatnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen modern, yaitu bahwa fungsi-fungsi manajemen yang meliputi kegiatan perencanaan, melekat fungsi pengawasan preventif, dalam kegiatan pelaksanaan melekat fungsi *cross check and balances*, dalam kegiatan evaluasi melekat fungsi pengawasan represif dan ketiganya berada dalam lingkup fungsi pengawasan fungsional. Kesadaran dan harapan masyarakat semakin meningkat terhadap transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta aparatur pemerintah yang berdayaguna dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Upaya menciptakan *good governance* yang tercermin dalam politik nasional dalam memberantas KKN, merupakan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat saat ini. Namun upaya menciptakan *good governance* bukan hanya tugas dan fungsi Inspektorat, tetapi juga merupakan tugas dan kewajiban instansi/lembaga pemerintah lainnya.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Tahun 2009-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 maka Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki visi:

“Menjadi Institusi yang Profesional, antisipatif dan responsif dalam mendukung serta memfasilitasi kinerja dan hasil kerja DPRD”. Dalam rangka pencapaian Visi tersebut, Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki misi:

1. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Internal
2. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Eksternal
3. Menjadi sumber informasi kegiatan DPRD dan studi bidang Politik

Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja Sekretariat DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
3. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
4. Penyiapan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD;
6. Fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum, dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum, serta pengkajian dan pengawasan;
7. Fasilitasi alat kelengkapan DPRD;
8. Fasilitasi penetapan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur;
9. Penyelenggaraan administrasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD;
10. Fasilitasi pelantikan pimpinan dan anggota DPRD;
11. Pelaksanaan hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, keprotokolan dan pelayanan aspirasi masyarakat;
12. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Dalam kedudukannya Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud Sekretariat DPRD DIY mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

1. Unsur Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Pimpinan : Sekretaris DPRD
 - b. Pembantu Pimpinan : Bagian-bagian
 - c. Pelaksana : Subbagian-subbagian
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - 3) Subbagian Kepegawaian;
- c. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Keuangan;
 - 2) Subbagian Penyusunan Program;
 - 3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi.
- d. Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian terdiri dari :
 - 1) Subbagian Pembentukan Produk Hukum;
 - 2) Subbagian Pengkajian dan Pengawasan;
 - 3) Subbagian Dokumen Hukum
- e. Bagian Persidangan, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Komisi dan Kepanitiaan DPRD;
 - 2) Subbagian Fasilitas Persidangan;
 - 3) Subbagian Risalah dan Dokumen Persidangan.
- f. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat;
 - 2) Subbagian Hubungan Masyarakat;
 - 3) Subbagian Data dan Teknologi Informasi.
- g. Jabatan Fungsional

BAB V

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2025 yang penyusunannya didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

Catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini struktur penganggarannya mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan dalam rangka ikut menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, khususnya di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 31 Desember 2025
Sekretaris DPRD DIY

YUDI ISMONO, S.Sos., M.Acc
NIP. 197107171996031004

